

SEMESTER II - 2021

LAPORAN TINDAK LANJUT RENCANA AKSI PELAKSANAAN RB

KEDEPUTIAN PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**LAPORAN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (RB)
KEDEPUTIAN PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SEMESTER II - TAHUN 2021**

| NO | CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI | PROGRAM | CAPAIAN | | |
|----|---|-------------------------------|---|--|-----|
| | | | TARGET | REALISASI | KET |
| 1 | Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pusat dan Unit Kerja | Program A Manajemen Perubahan | <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen Wantannas b. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Laporan Rencana Aksi Tindak Lanjut Pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional | <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan I dan II di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB Triwulan I dan II di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Laporan Rencana Aksi Tindak Lanjut Pelaksanaan RB Semester I di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional | |
| 2 | Memaksimalkan peran agen perubahan | | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan agent of change Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Agen Perubahan | Telah dilakukan pelatihan agen perubahan Setjen Wantannas bersama KemenPANRB serta telah dilakukannya monitoring secara berkala yang tertuang dalam laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi agen perubahan | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| 3 | Menyusun SOP terkait dengan sistem pengendalian penyusunan peraturan dan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya | Program B Deregulasi Kebijakan | Menyusun SOP terkait dengan sistem pengendalian penyusunan peraturan. Menyusun memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada memiliki peta keterkaitan | Telah tersusunnya peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya | |
| 4 | Meningkatkan kualitas JDIH | | Meningkatkan kualitas website JDIH | JDIH Setjen Wantannas telah terhubung dengan JDIHN dan KEMENKUMHAM, serta selalu meningkatkan kualitas website JDIH Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional | |
| 5 | Melakukan evaluasi peta proses bisnis secara berkala | Program D Penataan Tata Laksana | Laporan monitoring dan evaluasi peta proses bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional | Laporan monitoring dan evaluasi peta proses bisnis Semester I Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional | |
| 6 | Optimalisasi penerapan e-government yang terintegrasi dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE | | Mengintegrasikan penerapan e-government dengan perencanaan pengembangan SPBE | Telah tersusunnya Tata Kelola SPBE yang tertuang dalam Peraturan Setjen Wantannas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional | |
| 7 | Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindak lanjuti hasil <i>assessment</i> | Program E Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM | Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan mengikuti diklat jabatan fungsional, diklat yang mendukung pekerjaan | |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| 8 | Menyelesaikan kebijakan Standar Kompetensi Jabatan | | Menyusun dan mengesahkan kebijakan Standar Kompetensi Jabatan | Dalam Proses menyusun Standar Kompetensi Jabatan dan telah tersusunnya Kamus Kompetensi yang tertuang dalam Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi di lingkungan Setjen Wantannas | |
| 9 | Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (HCDP) | | Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (HCDP) | Dalam Proses menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (HCDP) | |
| 10 | Menerapkan manajemen talenta | | Laporan pelaksanaan manajemen talenta Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional | Telah tersusunnya Peraturan Setjen Wantannas Nomor 86 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Pegawai di lingkungan Setjen Wantannas | |
| 11 | Menyempurnakan ukuran kinerja organisasi sampai dengan individu | Program F Penguatan Akuntabilitas Kinerja | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya | Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya yang telah disusun oleh masing - masing individu dalam SKP Pegawai | |

| | | | | | |
|----|---|--------------------------------|--|--|--|
| 12 | Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal | Program G Penguatan Pengawasan | Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, <i>whistle blowing system</i> , penanganan benturan kepentingan dan peningkatan kapabilitas APIP | Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi pengelolaan pengaduan masyarakat <i>whistle blowing system</i> , penanganan benturan kepentingan dan peningkatan kapabilitas APIP Semester I Setjen Wantannas | |
| 13 | Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis | | Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional | Mengusulkan 1 Unit Kerja Setjen Wantannas untuk dijadikan unit kerja ZI menuju WBK | |